



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASTUTI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 261577

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.325.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/36 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 545 m2/54 m2 di KAB / KOTA KETAPANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/84 m2 di KAB / KOTA KETAPANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 3902 m2 di KAB / KOTA KETAPANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **151.500.000**

1. MOTOR, HONDA SOLO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA METIK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **112.780.000**

D. SURAT BERTAGIH **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **85.675.619**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

1.674.955.619

III. HUTANG

Rp.

5.143.026

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.669.812.593

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.